

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENGURANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN WAY TENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

(Skripsi)

Oleh  
EKA PURNAMA SARI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Oleh**

**Eka Purnama Sari**

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu daerah yang menerima program tersebut adalah Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017. Teori yang digunakan Teori Efektivitas. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Terdapat Lima indikator sebagai berikut : 1. Masyarakat memahami apa itu Program Keluarga Harapan dan tujuannya. 2. Masih banyak warga yang miskin belum menerima PKH. Namun ada juga warga yang kaya atau mampu, malah mendapatkan Program Keluarga Harapan. berarti PKH ini Belum Efektif dalam ketepatan sasaran. 3. Setiap awal bulan penerimaan dana PKH tidak pernah terlambat selalu tepat waktu masuk kerekening/tabungan penerima PKH. 4. Banyak masyarakat terbantu dengan adanya PKH dan sangat membantu beban masyarakat dalam masalah sekolah dan kesehatan. 5. Yang tadinya anak malas sekolah karena tidak ada uang saku jadi rajin sekolah dan yang jauh karena alasan transportasi sudah selesa setiap hari dengan semangat, begitu pula dengan ibu hamil dan balita lebih terjamin gizi dan kesehatan nya karena tidak perlu takut untuk memeriksa kesehatan karena keterbatasan biaya.

**Kata Kunci : Efektifitas, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan**

## Abstract

### Effectiveness of the Hope Family Program (PKH) in Tackling Poverty in Way Tenong District, West Lampung Regency

By

Eka Purnama Sari

In order to tackle poverty the government implemented the Family Hope Program (PKH), one of the areas that received the program was Way Tenong District, West Lampung Regency. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the Family Hope Program in reducing poverty in Way Tenong District, West Lampung Regency in 2017. Theory used Effectiveness Theory. descriptive research type with qualitative approach. Primary data sources and secondary data. The research location is in Way Tenong District. The results of the study show that: 1. The community understands what the Family Hope Program is and its purpose. 2. There are still many poor people who have not accepted PKH. But there are also people who are rich or capable, instead get the Hope Family Program. means this PKH is not yet effective in the accuracy of the target. Every month the receipt of PKH funds is never too late, always on time to enter the PKH recipient's account. 4. Many people are helped by PKH and greatly help the burden of the community in the health sector problems. 5. The child was lazy because he did not have pocket money so he was diligent in the school and was far away because of the reason he had managed every day. Pregnancy and toddlers have more guaranteed nutrition and health because they do not need to be afraid to check their health because of the limitations of biaya.

Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Poverty

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
MENGURANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN WAY TENONG  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh

**EKA PURNAMA SARI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Eka Purnama Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1316021032**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

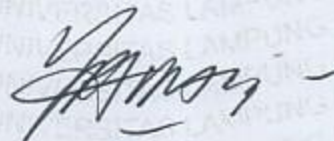
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**



**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**  
NIP 19680112 199802 1 001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

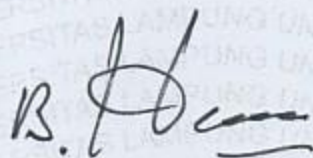


**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

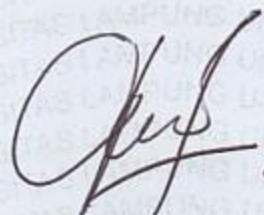
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji Utama : **Dewi Ayu Hidayati, S.Sos., M.Si.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 18 January 2019

Yang membuat pernyataan



Eka Purnama Sari  
NPM. 1316021032

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Eka Purnama Sari. Lahir di Fajar Bulan Kecamatan Waytenong pada Tanggal 02 Februari 1995 sebagai putri kelima dari pasangan Bapak M.Kiraat dan Ibu Kasmala Dewi. Penulis merupakan anak kelima dari 6 bersaudara, memiliki 3 kakak laki laki bernama Ihyak Uhlu Mudin,Ahmat Arido Hidayat Tosolihin, Muhadir Muhamat dan seorang adik laki-laki bernama Rizki Aris Munandar dan kakak perempuan Takzia Almunawaroh Penulis mengawali pendidikan pada Skola Dasar SDN1 Fajar Bulan Kecamatan Waytenong Kabupaten Lambar lulus pada tahun 2007,. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waytenong lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Waytenong lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus sebagai kewajiban studi, pada bulan Januari tahun 2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Way Petai, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.



## MOTTO

*Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung  
(Q.S 3: 173)*

*Mana mungkin Allah membiarkan tangan-tangan yang berdo'a  
kepada-Nya kembali kosong.  
(Anonim)*

*Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang kau harus terus  
bergerak.  
(Albert Einstein)*

*Jika anda menginginkan sesuatu jangan anda kejar karna nafsu  
ingin cepat memiliki tetapi kejarlah dengan semangat dan doa yang  
mengiringi  
(eka purnama sari)*

*Siapapun bisa menjadi apapun  
(eka purnama sari)*

*Persembahan*

*Sebuah kado sederhana  
kupersembahkan untuk  
kedua orang tuaku  
tersayang,  
Kelima saudaraku,  
Keluarga Besar m.salam  
dan Keluarga Besar ulaimi.*

*Allah akan meninggikan  
Orang orang yang beriman diantaramu  
Dan orang orang  
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat  
(Q.s. Al-Mujadalah: 11)*

*Kepada kedua  
orangtuaku:*

*Maaf karena aku belum bisa  
mengukir bahagia  
di wajahmu,*

*Maaf karena belum bisa  
menanam bangga  
di  
hatimu,*

*Maaf untuk semua air mata yang  
engkau tumpahkan  
karena aku,*

*Maaf karena belum mampu  
menghapus beban  
dari tubuh lelahmu,*

*Terimakasih  
untuk cinta dan doa tulusmu  
di setiap langkahku.*

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Budi Harjo S.Sos. M.IP selaku Pembimbing utama yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dewi Ayu Hidayati, S.Sos. M.Si. A. selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas

ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

6. Seluruh informan Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat, terimakasih atas informasi serta waktu yang diberikan.
7. Kedua orang tua yang telah menjadi inspirasi dan motivasi terbesar penulis, Kasmala Dewi (Ibuk) dan M.kiraat (Ayah) yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia. Terimakasih banyak atas segala dukungannya selama ini. Maaf masih menjadi beban kalian, tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Didikan dan semangat yang kalian berikan telah mengantar penulis hingga mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Unila. Gelar ini untuk kalian. Semoga Ibu dan Ayah selalu sehat sehingga kebanggan untuk menjadi alasan di balik senyuman kalian akan terus ada. Aamiin.
8. Kakakku Ihyak, Arido, Muhadir Takzia dan Adikku Rizki Aris Munandar tetaplah menjadi kebanggaan keluarga. Terimakasih untuk semua motivasi, semangat dan keceriaan yang kalian berikan. Salah satu hal yang paling dinanti ketika pulang dan dirindukan ketika merantau adalah kehangatan dan senda gurau bersama kalian.
9. Evo Edia., si *partner in crime* terimakasih telah menjadi bagian cerita perjalanan panjang ini. Hidup ini keras namun anda lebih kuat. Teruslah berusaha seberapa minimpun waktu tersisa, peluang selalu ada asalakan kamu tidak berhenti. Mungkin kamu akan berhasil, mungkin juga tidak. Peluangmu hanya akan menjadi nol jika kamu berhenti berusaha.
10. Evi Trianti SPD., teman yang menyadarkanku bahwa kalimat “semua akan

indah pada waktunya” benar ada. Terimakasih untuk pelajaran berharga yang gak sengaja diberikan pada tanggal 28 Juli 2017, itu bersejarah vi.

11. Sahabat sabahat terbaik sepermainan dan sepergaulan Defty ayu Sumadi S.Pt., Levina Febriyanti S.Si, Dianna Rahma S.Si., Siska Destiani, S.Pd., Umayah Amanda Dewi,SE , Devi Rifai. Spd, Oktarina, S.Tp. Putri Ayu Sisma Wardani SH, terimakasih untuk semua kenangan dan momen berharga selama berjuang . Kalian para perempuan luar biasa. Semoga kelak kita akan di pertemuan ditempat yang terbaik.
12. Empat konco kenthel selama kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan Amanda Sicilia NS, S.IP., dan Yolanda Margareta Silain S.IP., Bobby Kabarasa S.ip, Raindi Zikri S.IP gaktau mau nulis apa tapi dari awal semester 1 sampe sekarang kalian yang “*always listening always understanding*”. Terimakasih untuk kebersamaannya melewati suka duka dan menjadi pundak pundak yang begitu nyaman untuk disandarkan ketika beban dirasa tak tertahankan selama hampir 4 tahun ini. Gak ada kata menyesal kenal sama kalian, *i'am proud of you guys*.
13. Rini Setia Wati, S.IP., dan Amanda Sicilia NS ., S.IP para pejuang pukul 7 Dekanat. Temman yang selalu bersma walau tak bisa menjadi bisa Membuat yang kenal menjadi dekat. Kalian mengajarkanku bagaimana indahnya hasil yang tidak mengkhianati proses.
14. Angkatan 2013 jurusan Ilmu pemerintahan saudara seperjuanganku., Ina Wijaya, S.IP., Dormatio Manik, S.IP., Yolanda Margaretha Silaen, S.IP., Restiani Damayanti, S.IP., Fina Ria Tisa, S.IP., Vivi Alvionita,S.IP., Kenn Sindy Kirana Julia, S.IP., Dwi Titiawati, S.IP, Bustanul Haimia, S.IP, Riski Atika Sari, S.IP, Lusita Anjelina, S.IP., Hesti Seftia Wulandari,S.IP., Agnessia Diknas Pitaloka, S.IP., Ipnika Nurfasari, S.IP., Nadia Maudyna,

S.IP., Risky Nitha, S.IP., Putri Aphrodite, S.IP., Chici Afrianita, S.IP., Ocha Pawalin, S.IP., Rini Setiawati, S.IP., Defa Septia, S.IP., dan kawan-kawan seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk waktu dan kebersamaan selama ini semoga silaturahmi kita akan terus terjaga.

15. Teman sekamar KKN Desa Waypetai CIBON LOVER'S selama 60 hari, MbK Puri, Ria, Dian, Tiara. Jalan kaki sekitar 2 kilo meter demi makan bakso rudal dan pulang nya nyetopin anak sma pas pulang buat nebeng!! *Good luck guys*, semoga silaturahmi ini akan tetap terjaga bukan hanya sebatas 60 hari saja.
16. Para Gadis Penghuni Asrama Barselona : Diana, Levia, Defty, Nurul, Putri Usma, Atun, Lia, Darma, Murni, mbk Oca, Fifit, Erika, dan seluruh jajaran lainnya. Terimakasih untuk canda tawa dan keceriaannya, berkat kalian setidaknya penulis menjadi betah tinggal diperantauan.
17. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat dituliskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti semuanya sebagai amal sholeh. Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 January 2019

Eka Purnama Sari

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### GAFTAR GAMBAR

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas .....	15
B. Teori Efektivitas .....	20
C. Tinjauan Tentang Kemiskinan .....	24
D. Konsep Penanggulangan Kemiskinan.....	27
E. Konsep Program Keluarga Harapan.....	29
F. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	31
G. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	33
H. Penerima Program Keluarga Harapan.....	33
I. Hak, Kewajiban, Dan Sanksi Peserta Program Keluarga Harapan ....	35
J. Komponen Bantuan Dan Jangka Waktu Kepesertaan Program Keluarga Harapan.....	39
K. Ukuran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) .....	41
L. Kerangka Pikir .....	42

#### III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian Kualitatif .....	46
B. Fokus Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Informan .....	48
E. Jenis Dan Sumber Data .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Pengolahan Data .....	51



H. Teknik Analisis Data.....	52
I. Keabsahan Data.....	54

#### **IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat.....	56
B. Gambaran Umum Kawasan Agropolitan Way Tenong.....	57
C. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	59
D. Sarana Prasarana Dan Kelembagaan Pendukung Kawasan Way Tenong.....	60

#### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pemahaman Program.....	64
B. Tepat Sasaran.....	67
C. Tepat Waktu.....	76
D. Tercapainya Tujuan.....	78
E. Perubahan Nyata.....	83

#### **VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017.....	5
2. Persentase Angka Kemiskinan Dan Kapita Perbulan Pada Kabupaten Di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017 .....	6
3. Jumlah Angka Kemiskinan Di Lima Belas Kecamatan Yang Ada Di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 .....	9
4. Komponen Bantuan PKH Tahun 2014 dan 2015 .....	40
5. Informant.....	48
6. Data Skunder .....	50
7. Jumlah Dan Tingkat Kepadatan Penduduk Di Kawasan Agropolitan Way Tenong.....	58
8. Jumlah Angkatan Kerja Dan Jenis Pekerjaan Pada Kawasan Agropolitan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.....	58
9. Luas Lahan Berdasarkan Penggunaannya Di Kecamatan Way Tenong....	60
10. Kelembagaan Penunjang Yang Berada Pada Kawasan Agropolitan Way Tenong .....	62
11. Bantuan Tunai Bersyarat Untuk Peserta PKH Tahun 2015 .....	72
12. Penerima PKH Untuk Fasilitas Pendidikan .....	73
13. Penerima PKH Untuk Fasilitas Kesehatan .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Bagan Kerangka Pikir .....	45
2. Wilayah Kabupaten Lampung Barat .....	57

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah merupakan penggerak roda pemerintahan yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (alinea ke IV) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 260 juta jiwa. Indonesia saat ini terdiri dari 17.508 pulau, sekitar 6.000 diantaranya dihuni, terbagi menjadi 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota. Ada sekitar 300 kelompok yang berbeda etnis pribumi di Indonesia, dan 742 bahasa dan dialek yang berbeda (BPS, 2010). Dengan populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Masalah seperti ini sering terjadi di sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi hampir di semua negara, khususnya negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan ini menjadi prioritas utama badan dunia seperti PBB dan badan dunia lainnya baik yang berada di bawah naungan PBB maupun negara maju yang turut prihatin terhadap kemiskinan yang masih melanda di beberapa belahan dunia lainnya.

Kemiskinan menjadi masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-

kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya masa depan oleh karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan (Simanjuntak, 2010). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Dirjen PMD Depdagri, 2003) dalam (Parnamian, 2010).

Menurut Suparlan (1993) dalam (Mubyarto, 2010), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Para ahli ilmu sosial sependapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, banyak ahli yang juga percaya bahwa kemiskinan bukanlah suatu gejala yang terwujud semata-mata hanya karena sistem ekonomi. Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupannya.

Di Indonesia persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2017 adalah 10,64 persen. Penduduk miskin di Indonesia pada daerah perkotaan adalah 7,72 persen, sedangkan penduduk desa adalah 13,93 persen pada tahun 2017. Pada umumnya masyarakat yang masih terbelakang, berpenghasilan rendah, dan jika diukur dengan kebutuhan hidup minimum masih di bawah standar

itulah yang kebanyakan orang mendefinisikannya sebagai masyarakat miskin (Sumodiningrat 2009:13), (Sumber: BPS Tahun 2017).

Berdasarkan persentase pada paragraf di atas, sepintas terlihat bahwa kemiskinan di perkotaan masih lebih baik daripada di perdesaan, sehingga kemiskinan di perkotaan dipandang belum menjadi masalah *urgen*, setidaknya dibandingkan kemiskinan di perdesaan. Namun demikian, tentunya pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan. Keduanya tetap harus mendapatkan perhatian serius dan prioritas yang sama untuk segera diatasi.

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial dalam masyarakat yang terdapat di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya penanggulangannya telah dilakukan pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat miskin. Misalkan, banyak kebijakan yang sifatnya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, contohnya BLT (Bantuan Langsung Tunai), Inpres Desa Tertinggal.

Suharto (2010: 142 – 143) menyatakan bahwa persoalan kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan merupakan muara dari masalah-masalah sosial lainnya seperti; anak jalanan, pekerja anak, kekerasan rumah tangga, kebodohan, pengangguran bahkan kerawanan sosial.

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017**

<b>Provinsi</b>	<b>2017</b>
Papua	27.62
Papua Barat	25.1
NTT	21.85
Maluku	18.45
Gorontalo	17.65
Aceh	16.89
Bengkulu	16.45
NTB	16.07
Sulawesi Tengah	14.14
Lampung	13.69
Sumatra Selatan	13.19
DI Yogyakarta	13.02
Jawa Tengah	13.01
Sulawesi Tenggara	12.81
Jawa Timur	11.77
Sulawesi Barat	11.3
Sumatra Utara	10.22
Sulawesi Selatan	9.38
Jawa Barat	8.71
Jambi	8.19
Sulawesi Utara	8.1
Kalimantan Barat	7.88
Riau	7.78
Kalimantan Utara	7.22
Sumatra Barat	6.87
Maluku Utara	6.35
Kalimantan Timur	5.19
Kep. Riau	6.06
Banten	5.45
Kalimantan Tengah	5.37
Kep. Bangka Belitung	5.2
Kalimantan Selatan	4.73
Bali	4.25
DKI Jakarta	3.77
<b>Indonesia</b>	<b>10.64</b>

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia 2017

Indonesia merupakan negara berkembang di Dunia. Salah satu yang menjadi persoalan Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang saat ini adalah mengentaskan jumlah penduduk miskin. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 adalah 10.64 persen. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang mempunyai penduduk



miskin sebesar 13.69 persen. Hal tersebut menempatkan Provinsi Lampung pada urutan ke 9 pada presentase penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Sekitar 80 persen penduduk miskin Provinsi Lampung yang berjumlah 1,1 juta hidup di wilayah pedesaan. Mereka dikategorikan penduduk miskin karena berpenghasilan maksimal Rp. 380.000 per bulan, dibandingkan dengan upah minimal regional sebesar 1, 7 juta yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung dengan nilai uang, yang mencerminkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) baik makanan maupun nonmakanan. Artinya, garis kemiskinan dihitung dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, garis kemiskinan akan berubah sejalan dengan perubahan harga komoditas yang masuk kebutuhan dasar.

(Sumber: [www://https://economy.okezone.com./read/2015/2018/1234daftar-23 daerahtertinggal-diindonesia](https://economy.okezone.com/read/2015/2018/1234daftar-23-daerahtertinggal-diindonesia))(17/03-2018: 17.32).

**Tabel 2. Persentase Angka Kemiskinan dan Kapita Perbulan pada Kabupaten di Provinsi Lampung pada Tahun 2017**

No	Kabupaten	Garis Kemiskinan Kapita Perbulan (Rp/Kap/Bulan) (Rupiah).2016	Persentase Angka Kemiskinan
1	Lampung Barat	371926	15,06%
2	Tanggamus	332302	17,06 %
3	Lampung Selatan	346457	17,09%
4	Lampung Timur	331765	17,38%
5	Lampung Tengah	362475	16,86 %
6	Lampung Utara	369628	23,67%
7	Way Kanan	313733	18,87 %
8	Tulang Bawang	362185	16,87%
9	Pesawaran	330874	17,86 %
10	Pringsewu	379279	15,54 %
11	Mesuji	353477	16,81%
12	Tulang Bawang Barat	358939	16,31%
13	Pesisir Barat	371724	15,08 %
14	Bandar Lampung	502968	8,92 %
15	Metro	331201	17,16 %

Sumber: BPS Provinsi Lampung pada tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase masyarakat miskin terbanyak adalah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan persentase masyarakat miskin terendah ada di Kota Bandar Lampung. Walaupun Lampung Utara menempati urutan terbangak masyarakat miskin namun peneliti memilih Kabupaten Lampung Barat, hal ini disebabkan Lampung Barat dikategorikan sebagai kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung berdasarkan berita yang diperoleh *Online Okezone Finance (10/12-2015-2019:10.18)*.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat, angka kemiskinan di kabupaten tersebut pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Hal itu sesuai dengan hasil pendataan survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang diselenggarakan pada Maret tahun 2017. Kepala Seksi (Kasi) Statistik Sosial Yasir Wijaya, S.Si mendampingi Kepala BPS Kabupaten Lambar Amirudin, S.Si, M.M, mengungkapkan:

“angka kemiskinan di Kabupaten Lambar pada tahun 2016 mencapai 15,06 persen dari jumlah penduduk sebanyak 295.689 jiwa, kemudian di tahun 2017 turun menjadi 14,32 persen dari jumlah penduduk sebanyak 298.286 jiwa. “Jadi ada penurunan angka kemiskinan 0,74 persen,” ujar Yasir di ruang kerjanya, Rabu (21/2-2018)”.

Penyebab menurunnya angka kemiskinan tersebut, diantaranya dikarenakan pendapatan penduduk Lambar bertambah dengan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran berkurang. Kemudian, di Kabupaten Lambar penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Misalnya di sub sektor pertanian hortikultura membutuhkan banyak tenaga kerja  
(sumber: *berita online radarlambar.com, diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 10:07 WIB*).

Sementara diketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki banyak potensi dan sumber daya alam, potensi pariwisata alam, pertanian dan perkebunan yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jika

keadaan ini dikembangkan sesuai dengan keadaan geografisnya maka akan mampu menanggulangi kemiskinan atau paling tidak dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dari peningkatan sumberdaya yang ada, mengingat tipisnya perbedaan antara tahun 2016 sampai tahun 2017 hanya mencapai 0,74%. Oleh karena itu pemerintah pusat melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), salah satunya di Kabupaten Lampung Barat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin besar dan bertambah. Kabupaten Pesisir Selatan, angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Simanjuntak, 2010).

Program Keluarga Harapan (Pedoman Umum PKH: 2012 ) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan

bantuan besyarat dan disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan diadakan untuk membuka jalan bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi diri dan potensi daerahnya.

Berdasarkan persentase teknis, penulis ingin meneliti tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat, khususnya di Kecamatan Way Tenong. Jika dilihat dari persentase kemiskinan maka kecamatan Way Tenong termasuk dalam urutan ke 9 dari angka perbandingan jumlah penduduk dan rakyat miskinnya. Berikut adalah tabel presentase kemiskinan di 15 kecamatan Kabupaten Lampung Barat:

**Tabel 3. Jumlah Angka Kemiskinan di Lima Belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Angka Kemiskinan	Persentase (%)
1	Balik Bukit	29672	1208	4.0712
2	Belalau	30202	1133	3.7514
3	Sukau	34400	1104	3.2093
4	Gedung Surian	27709	887	3.2011
5	Sekincau	33321	1063	3.1902
6	Air Hitam	32201	1021	3.1707
7	Bandar Negeri Suoh	28892	887	3.0701
8	Batu Ketulis	32809	974	2.9687
9	Way Tenong	34061	1005	2.9506
10	Pagar Dewa	38202	1119	2.9292
11	Suoh	27002	788	2.9183
12	Kebun Tebu	28020	813	2.9015
13	Sumber Jaya	36607	1051	2.8710
14	Lumbok Seminung	35703	993	2.7813
15	Batu Brak	33790	939	2.7789

Sumber : Pengolahan data BPS kabupaten Lampung Barat tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, di Kabupaten Lampung Barat terdapat 15 kecamatan. Kecamatan yang jumlah angka kemiskinannya paling tinggi adalah Kecamatan Balik Bukit dan kecamatan yang memiliki angka kemiskinan paling rendah adalah Kecamatan Batu Brak. Akan tetapi penulis memilih penelitian di Kecamatan Way Tenong dengan alasan kemudahan dalam penelitian selain itu juga penulis lebih menguasai letak geografi dan penduduk yang tinggal di kecamatan Way Tenong, jika dibandingkan dengan empat belas kecamatan lain nya dalam penerimaan Program Keluarga Harapan Kecamatan Way Tenong.

Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals* atau *MDGs*). Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pengurangan angka kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu.

PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. Namun dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Barat terjadi kesalahan, yaitu tidak tepat sasaran. Penerima bantuan tunai atau PKH seharusnya kepada keluarga yang tidak mampu, namun yang terjadi adalah pemberian bantuan tersebut kepada keluarga yang merupakan pemilik rumah batu (beton), sementara banyak masyarakat yang layak menerima, namun tidak

diberikan bantuan. (sumber: editorlambar.com, diakses pada tahun 2018 pukul 11:50 WIB).

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan perbedaan penerima KSM di kabupaten Lampung Barat tahun 2016 sebanyak 3.565 KSM yang menerima bantuan PKH tahap 2 dengan dana tersalur untuk wilayah kabupaten Lampung Barat memberikan uang belanja tunai sekitar Rp2 miliar kepada 3.565 keluarga sangat miskin (KSM) di Kabupaten Lampung Barat, untuk tri wulan kedua 2016 ini, pada tahun ini menurut hasil pengamatan berita *online* menyatakan bahwa: Besaran dana yang disalurkan pada periode kedua ini menurun dari jumlah yang disalurkan pada tri wulan pertama sebesar Rp3 miliar. Hal itu karena dana pokok PKH sebesar Rp500 ribu untuk setiap KSM telah direalisasikan pada tri wulan pertama. (Sumber Berita: [http://www. saibumi.com/artikel-78310-3565-ksm-di-lampung-barat-terima-pkh-tahap-2.html#ixzz5MX9157Uu](http://www.saibumi.com/artikel-78310-3565-ksm-di-lampung-barat-terima-pkh-tahap-2.html#ixzz5MX9157Uu))

Melihat permasalahan di atas, penulis merasa tertarik dalam penulisan skripsi ini. Mengacu pada pemberian bantuan tunai atau PKH (Program Keluarga Harapan) yang tidak tepat sasaran. Penulis menitik beratkan pada Kecamatan yang mempunyai angka kemiskinan yang rendah yaitu Kecamatan Way Tenong dengan Judul “Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Kemiskinan (studi pada Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).

Sebagai perbandingan penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

1. Kartiawati (2016) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (studi pada peserta PKH Kampung Bonglai Kec.Banjit Kab. Way Kanan. Penelitian ini lebih menekankan bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif dalam Ekonomi islam.
2. Slamet Riyadi (2016) dalam skripsi yang berjudul analisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap keluarga sangat miskin (KSM) penerima bantuan (studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) penelitian ini lebih menekankan bahwa Program Keluarga Harapan yang mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen kehadiran peserta PKH pada fasdes dan faskes, adanya mekanisme pendampingan yang intens oleh petugas.

Dari 2 penelitian diatas menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH pada tiap wilayah memiliki pengaruh yang berbeda-beda, Begitu pula dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan mengkaji "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat." Penelitian ini lebih menekankan efektif atau tidaknya program PKH dalam mengurangi kemiskinan di lihat dari :

1. Akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

2. Taraf pendidikan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
3. Status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017?"

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Efektifitas Program Keluarga Harapan dalam Mengurangi Kemiskinan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017".

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan.



## 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat serta gambaran nyata khususnya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dan Kecamatan Way Tenong.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Efektifitas**

#### **1. Pengertian Efektifitas**

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai berapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut:

Hidayat (1968:33), yang menjelaskan bahwa “efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Kurniawan (2005:109), “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas fungsi (operasional kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya”.

Adapun pengertian efektivitas menurut Martoyo (1998:4), “efektivitas adalah seberapa besar tingkat kedekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input”.

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat juga disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut.

Selanjutnya menurut Cambel J.P pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program

- 4) Tingkat output dan input
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian teoritis dan praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda tentang pengertian dan konsep efektivitas dipengaruhi oleh latar belakang dari keahlian yang berbeda pula.

Menurut Hidayat menegaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Gibson juga berpendapat efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama (Ibnu, 2009).

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010: 13), efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau

program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, ada empat hal yang merupakan unsur-unsur efektifitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Ketepatan waktu, sesuatu yang dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapainya tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Manfaat, sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- 4) Hasil, sesuatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan itu memberikan hasil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan waktu dalam memberikan pelayanan serta adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan padanya.

## **2. Pendekatan Terhadap Efektivitas**

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

### **a. Pendekatan sasaran**

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan ini dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Selain tercapainya tujuan, efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. Tujuan tercapai dengan waktu yang tepat maka program tersebut efektif.

### **b. Pendekatan sumber**

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai

macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori

mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga berujung pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

c. Pendekatan proses

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

## **B. Teori Efektifitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

1. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup).
3. Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono (2000: 29), pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.



Gibson dkk dalam Supriyono(2000: 29), memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu :

1. seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
2. hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P (1989:121) , pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hani Handoko efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Menurut Sutrisno Edi (2007: 125), dari beberapa pendapat dan teori efektivitas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainyas asaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal

pemerintah mengeluarkannya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ini adalah untuk mengurangi volume sampah. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan. Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman program, 2) Tepat sasaran, 3) Tepat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

### **C. Tinjauan Tentang Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

#### **1. Kemiskinan**

Pendapat pertama menurut Sudarwati dalam Kartasasmita (2006, h.22), kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Pendapat ke dua mengemukakan dalam perspektif yang lebih luas lagi, David Cox dalam Suharto (2009, h.18-19) membagi kemiskinan kedalam

beberapa yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial.

Pendapat ke tiga dikemukakan oleh Zygmunt Bauman (1998:1) merinci setidaknya terdapat 3 pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan.

- a. Kemiskinan yang dideskripsikan sebagai kekurangan kebutuhan hidup . Kemiskinan, dalam hal ini, didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sebuah komunitas kekurangan secara esensial untuk memenuhi standar kehidupan minimum yang terdiri dari kebutuhanj pangan, pakaian dan tempat tinggal yang layak
- b. Kemiskinan yang dideskripsikan dari aspek hubungan dan kebutuhan sosial, seperti social exclusion (pengucilan sosial), ketergantungan, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pada akses memperoleh pendidikan dan pengetahuan.
- c. Kemiskinan yang dideskripsikan sebagai kurangnya penghasilan untuk memperoleh kebutuhan hidup layak yang ditetapkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dari sinilah munculnya pemilahan kemiskinan secara global berdasarkan pendapatan harian keluarga, yaitu kurang dari *\$1* atau *\$2* sehari.

## 2. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan secara nyata dan kemiskinan secara rata-rata. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi

dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

Sumber : *Suharto, Edi .2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan social dan Pekerjaan Sosial, Cet .3. Bandung: PT Rafika Aditama*

### **3. Pemahaman Mengenai Kemiskinan**

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :

- 1) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- 2) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

- 3) Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

#### **D. Konsep Penanggulangan Kemiskinan**

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Keluarga miskin merupakan keadaan dimana ketidakmampuan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga harapan adalah keluarga yang telah terputus dari rantai kemiskinan, memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Keluarga

miskin merupakan keadaan dimana ketidakmampuan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga harapan adalah keluarga yang telah terputus dari rantai kemiskinan, memiliki pendidikan dan kesehatan yang baik.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :

- 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- 2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
- 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam

pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

- 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

#### **E. Konsep Program Keluarga Harapan**

Untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial, maka dalam tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai pembelajaran kepada masyarakat miskin agar dapat lebih disiplin dalam pengelolaan bantuan agar dirasakan menjadi lebih bermanfaat dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatannya, melalui kebijakan bersyarat yaitu lebih dikenal dengan program keluarga harapan, yaitu program pemberian uang tunai kepada rumah tangga miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Program keluarga harapan difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya masyarakat melalui pemberdayaan kaum ibu dan mendorong agar anaknya tetap sehat dan bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan BPS sebagai target peserta. Di bidang pembiayaannya, anggaran program keluarga harapan dialokasikan melalui belanja Bansos Bidang Perlindungan sosial yang bersyarat, artinya bagi peserta yang menerima program keluarga harapan wajib menyekolahkan anaknya yang berusia sekolah 6-15 tahun, melakukan pemeriksaan kesehatan yang mencakup ibu hamil, ibu melahirkan,



ibu nifas, pemeriksaan gizi, serta pemeriksaan imunisasi balita. Dalam jangka pendek program keluarga harapan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Karena minimnya akses rumah tangga miskin menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin.

Adapun tujuan khusus dari PKH (Pedum PKH 2008, h.12) terdiri atas:

1. Meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari keluarga RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan usia 5 - 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak keluarga RTSM.

Sasaran atau Penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan hal ini dikarenakan agar pemenuhan syarat ini dapat berjalan secara efektif.

Program keluarga harapan bukan kelanjutan program bantuan langsung tunai yang diberikan dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak, namun program keluarga harapan merupakan

perlindungan sosial yang berbentuk bansos bersyarat berbasis rumah tangga miskin, sampai sekarang pelaksanaannya masih bersifat uji coba. Kebijakan program keluarga harapan dicetuskan antara lain karena adanya situasi krisis global, dimana kondisi ekonomi menurun, sulit mendapatkan kebutuhan pokok terutama dialami oleh masyarakat miskin dan rentan, sehingga dikhawatirkan jumlah masyarakat miskin meningkat.

#### **F. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program *conditional cash transfers (CCT)* atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil)

##### **1. Landasan Hukum pemberian PKH adalah:**

- Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

- Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

## 2. Dasar Pelaksanaan PKH

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31 /KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.
- Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
- Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD".
- Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

### **G. Tujuan Program Keluarga Harapan**

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH inibaik secara khusus maupun secara umum.

Tujuan khusus PKH, yaitu:

1. meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM.
2. meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.
3. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM

Tujuan umum PKH, yaitu:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

### **H. Penerima Program Keluarga Harapan**

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut

berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua—ayah, ibu—dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita.
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun),
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15),
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.

## **I. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Peserta Program Keluarga Harapan**

### **1. Hak Peserta PKH adalah:**

- a. Menerima bantuan uang tunai.
- b. Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2. Kewajiban Penerima Program adalah**

- a. Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH
  - 1) Kategori Persyaratan Kesehatan Anak
    - Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 (tiga) kali.
    - Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimalsebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus.
- Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutinsetiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/*Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.

2) Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas

- Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.
- Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.

b. Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta PKH

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikanan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah

singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut:

- 1) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/SalafiyahUla/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
- 3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B).
- 4) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yakni mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah atau *shelter* yang



dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

- 5) Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur.

### **3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Komitmen**

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,00.
- b) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,00.

- c) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari pelanggaran ini. Peserta dapat menggunakan bantuan PKH untuk keperluan apa saja, asal mereka memenuhi syarat pendidikan dan kesehatan. Penggunaan uang bantuan *tidak akan* dimonitor oleh program. Semua peserta *wajib* menjalankan kewajiban, dan apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan.

#### **J. Komponen Bantuan dan Jangka Waktu Kepesertaan Program Keluarga Harapan**

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan. Skenario Komponen Bantuan per RTSM per tahun pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Komponen Bantuan PKH TA 2014 dan 2015**

No	Komponen Bantuan	Bantuan Per RTSM (per tahun) T A 2014	Bantuan Per RTSM (per tahun) T A 2015
1	Bantuan tetap	300.000	500.000
2	Bantuan kesehatan untuk Ibu Hamil / Nifas Menyusui Balita / AnakUsia Pra Sekolah	1.0000.000	1.000.000
3	Bantuan Pendidikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan sbb:		
	• Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau sederajat	500.000	450.000
	• Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat	1.000.000	750.000
	• Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat		1.000.000
4	Bantuan Minimum	800.000	950.000
5	Bantuan Maksimum	2.800.000	3.700.000
6	Rata-rata Bantuan (mak+Min)/2	1.800.000	2.325.000
7	Indeks Peserta Lama Dalam RKAKL	1.614.000	1.865.000
8	Indeks Peserta Baru Dalam RKAKL	403.500	516.000

Catatan:

1. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak.
2. Besar bantuan adalah 16 % rata-rata pendapatan RTSM per tahun.
3. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25 % pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

Meski Program Keluarga Harapan termasuk program jangka panjang, namun kepesertaan PKH tidak akan bersifat permanen. Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang

mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (*Natural Exit*). Untuk peserta PKH yang tidak keluar alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metode tertentu.

#### **K. Ukuran Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauhmana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM. Indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

1. Pemahaman Program, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan persiapan sosialisasi.
2. Tepat Sasaran, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data RTM penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi.

3. Tepat Waktu, setelah dilakukan sosialisasi RTM mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada RTM penerima bantuan dengan tepat waktu.
4. Tercapainya Tujuan, dana yang diterima oleh RTM merupakan dana yang diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesehatan.
5. Perubahan Nyata, merupakan hasil dari program PKH yang disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik, dan terjadi perubahan yang dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah dilakukannya kebijakan.

#### **L. Kerangka Berpikir**

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir, serta tingginya komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun faktanya, capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan justru mengalami perlambatan 1 – 1,5% setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan besarnya alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Permasalahan kemiskinan sangatlah memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh untuk menghindari kemungkinan merosotnya mutu generasi (*lost generation*) di masa mendatang. Dalam upaya mengurangi

kemiskinan juga perlu dilakukan pendekatan kemanusiaan yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan kesejahteraan melalui peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, serta penyediaan jaminan dan perlindungan sosial. Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat miskin sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

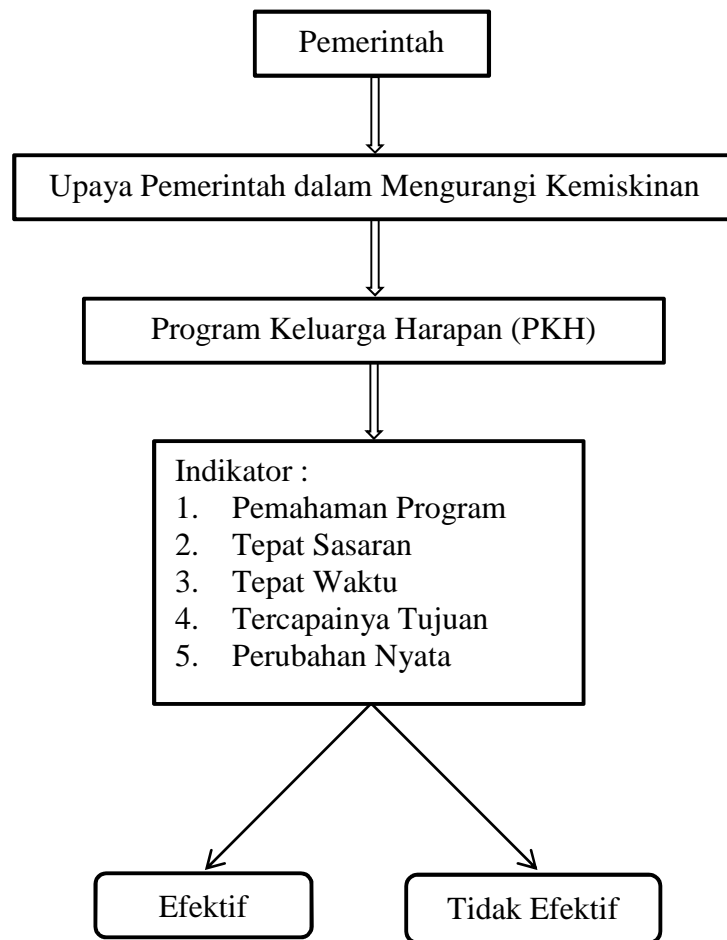
Pemerintah dalam usahanya menurunkan tingginya angka kemiskinan yaitu dengan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS, RASKIN, BSM, PKH), program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), pemberdayaan usaha mikro (KUR). Pada Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 silam.

PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan

dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok miskin.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya efektifitas PKH dalam mengurangi kemiskinan bagi penerima bantuan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2014 - 2015. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan hubungan antara desain PKH sebagai sebuah kebijakan publik dengan efektifitas penerapan program keluarga harapan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2014-2015.



**Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir**



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian Kualitatif**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mendeskripsikan fenomena secara akurat dan terperinci. Menurut Husain dan Purnomo, (2009:78) metode penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Alasan memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu: pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual yang berangkat dari masalah yang sifatnya holistik (secara keseluruhan), kompleks dan dinamis yang tidak bisa diteliti dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau kuantifikasi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, artinya penelitian difokuskan pada fenomena yang dipilih dan kemudian dipahami secara mendalam. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci terhadap suatu organisasi atau fenomena tertentu.

## B. Fokus Penelitian

Moleong (2006: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data tersebut menarik.

Penulis menetapkan indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Program Keluarga Harapan di Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat
2. Tepat Sasaran penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
3. Tepat Waktu saat pencairan dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
4. Tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan
5. Perubahan nyata yang dirasakan Masyarakat Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat sebelum dan Sesudah adanya Program Keluarga Harapan

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah penerima PKH sebanyak 1.005 KSM. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, Kecamatan Way Tenong merupakan lokasi PKH dengan jumlah KSM cukup banyak di Lampung Barat, serta penulis berasal dari kecamatan tersebut. *Kedua*,

pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penelitian. *Ketiga*, faktor kemudahan dalam memperoleh sumber data dalam penelitian.

#### D. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan teknik *purposive*, Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, petugas pelaksana PKH (Program Keluarga Harapan) dan informan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

**Tabel 5. Informan**

No	Informan
1	Dinas sosial
2	Kepala kecamatan
3	Ketua PKH
4	Penerima PKH

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2018

#### E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain. Lofland dalam Moleong (2006: 157) jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto.

Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, pengambilan foto atau film. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan-informan yang dipilih tersebut meliputi :

- a. Dua sampai tiga orang informan yang mewakili satu dusun penerima PKH di Kecamatan Way Tenong.
- b. Dua sampai tiga orang petugas operator atau pendamping mewakili UPPKH di Kecamatan Way Tenong.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai *key informan*.

#### 2. Data Sekunder

Data skunder diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

**Tabel 6. Data Skunder**

No	Dokumen
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
2	Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
3	Pedoman Umum PKH: 2012 mengenai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin
4	Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5	BPS Tahun 2017 yang memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia.

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2018

## F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan sistem tanya-jawab antara peneliti dengan informan yang dianggap layak atau relevan dalam penelitian ini dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara (Nazir, 2011:193). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memporelah data dari informan terkait dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan Kepala kecamatan dan dinas sosial di Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen baik yang bentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen publik dan dokumen pribadi seperti foto, arsip kepala kecamatan Way Tenong Dan Ketua PKH, laporan para penerima PKH.

## 3. Observasi

Observasi dilakukan guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi. Rincian observasi yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

- a. melihat petugas PKH memberi arahan atau bimbingan kepada masyarakat
- b. ikut serta dalam perkumpulan para ketua PKH dalam pertemuan tiap pekan/kelurahan
- c. berkunjung di kediaman penerima PKH guna melihat keberlangsungan kehidupan penerima PKH

## **G. Teknik Pengolahan Data**

Proses selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Editing bertujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya.

### 2. Interpretasi data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

## **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2006: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data harus bermakna jika ditafsirkan atau dianalisis pada konsteksnya, oleh karena itu data yang diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi perlu dianalisis secara akurat dan seksama. Menurut Miles dan Huberman (dalam Morissan, 2012: 27) Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mewawancarai informan yaitu Dinas Sosial, Kepala Kecamatan Way Tenong, Ketua PKH, dan tokoh masyarakat penerima bantuan PKH Kecamatan Way Tenong menggunakan pertanyaan yang sama untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. *Display data*

*Display data* adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik



secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada *display data* ialah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektivitas.. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses *display data*. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## I. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2006: 324) ada beberapa teknik untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang meliputi sebagai berikut:

### 1. Kredibilitas Data

Kredibilitas data diperoleh dengan melakukan teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan data dari luar data tersebut sebagai pembanding sehingga kebenaran itu dapat diketahui dengan

pasti, selain itu juga dapat melakukan pengamatan, memperbanyak referensi serta melakukan pembicaraan dengan rekan sejawat.

2. Keteralihan Data (*Transferability*)

Keteralihan data dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada *si pemakai*, yaitu sampai manakah hasil sebuah penelitian dapat mereka gunakan pada konteks dan situasi tertentu. Apabila pemakai melihat ada dalam penelitian itu yang serasi pada situasi yang dihadapinya, maka situasi tampak adanya transfer, walaupun dapat diduga tidak ada dua situasi yang sama.

3. Ketergantungan Data (*Dependability*)

Ketergantungan data dapat digunakan dengan model *audit trail* yaitu pemeriksaan data lapangan, reduksi data, dan interpretasi data.

4. Kepastian Data (*Confirmability*)

Hal ini diperoleh melalui pengumpulan data, rekonstruksi data, sintesis *emik-etik*, dan memperhatikan etika lapangan.

#### **IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

##### **A. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat.**

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran Daerah Otonom Baru Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2013 adalah 3.368,14 km<sup>2</sup>.

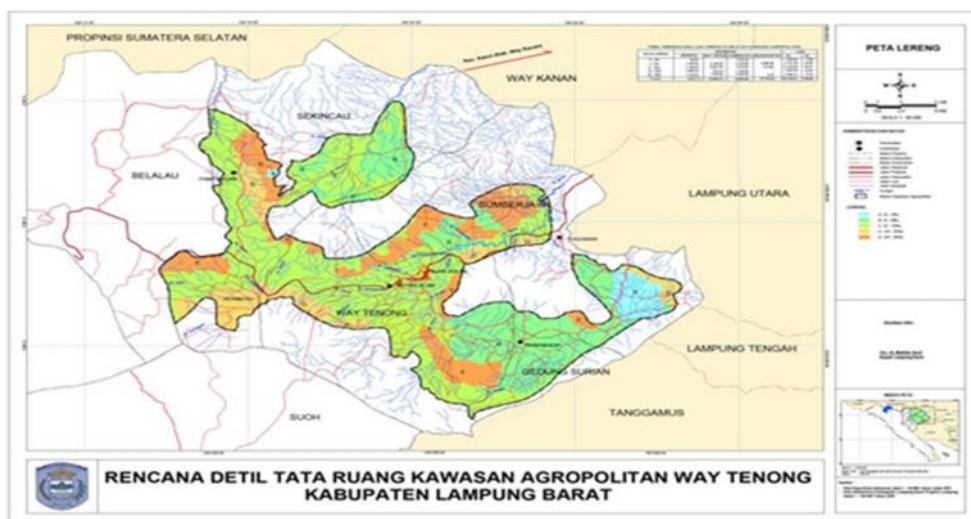
Daerah yang terdiri dari lima belas kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, Gedung Surian, Pagar Dewa, Sekincau, Belalau, Batu Ketulis, Suoh, Bandar Negeri Suoh, Batu Brak, Balik Bukit, Sukau, Lumbok Seminung. Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 4°, 47', 16" – 5°, 56', 51" LS dan 103°, 35', 08" – 104°, 33', 51" BT.

Wilayah Lampung Barat berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu)
2. Sebelah Selatan : Samudera Hindia dan Teluk Semangka
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Barat
4. Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus.

## B. Gambaran Umum Kawasan Agropolitan Way Tenong

Kawasan agro politan Way Tenong memiliki variasi ketinggian lahan berkisar antara 825 m s/d 1.200 m dpl. Titik terendah dijumpai di Gedung Surian, sedangkan titik tertinggi dijumpai di Way Tenong berbatasan dengan TNBBS. Kawasan ini didominasi bentuk wilayah berombak (4-8%) dan bergelombang (9-15%). Peta Kawasan agropolitan Way Tenong dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Wilaya Kecamatan Waytenong**

Sumber : Bappeda Lampung Barat, 2018

Kawasan agropolitan Way Tenong memiliki potensi air permukaan yang cukup tinggi karena memiliki aliran sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun yakni Way Besai dan Way Giham.

Namun laju erosi di daerah tangkapan airnya cukup tinggi akibat pembukaan lahan baik untuk kebutuhan budidaya ataupun pemukiman. Jumlah penduduk di Kawasan Way Tenong yaitu 127.121 jiwa, terdiri dari 62.886 laki-laki dan 64.233 perempuan, yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Way

Tenong, Gedung Surian, Sekincau, dan Sumberjaya. Tingkat kepadatan penduduk di kawasan ini masih tergolong sangat rendah, yakni berkisar 1-2 jiwa per hektar (Bappeda Lampung Barat, 2010). Tabel 7 menyajikan jumlah dan tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kawasan Agropolitan Way Tenong.

**Tabel 7. Jumlah Dan Tingkat Kepadatan Penduduk Di Kawasan Agropolitan Way Tenong**

No	Kecamatan	L	P	Jumlah	KK	Kepadatan (jiwa/ha)
		Jiwa	Jiwa	Jiwa		
1	Way Tenong	20.361	18.904	39.265	10.534	2
2	Gedung Surian	7.972	7.121	15.093	3.547	2
3	Sekincau	18.911	16.420	35.331	10.653	1
4	Sumberjaya	15.642	21.788	37.432	10.063	1
Total/ Rata-rata		64.233	127.121	34.797	8.625	1,5

Sumber :Bappeda Lampung Barat, 2015

Sebagian besar penduduk di Kawasan Way Tenong ini memiliki mata pencaharian sebagai petani baik pada subsektor perkebunan maupun subsektor hortikultura (sayuran dataran tinggi). Data mengenai jenis pekerjaan penduduk di kawasan Way Tenong dapat dilihat pada Tabel 8

**Tabel 8. Jumlah Angkatan Kerja Dan Jenis Pekerjaan Pada Kawasan Agropolitan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat**

No	Jenis pekerjaan	Way teong (jiwa)	Sekincau (jiwa)	S. Jawa (jiwa)	G. Suriah (jiwa)
1	Petani/buruh tani	20.361	18.904	29.265	10.534
2	Pegawai Negeri Sipil	1.972	1.121	1.509	547
3	Pedagang	911	420	533	253
4	Wiraswata	642	788	743	206
5	Buruh Bangunan	240	102	295	250
6	TNI/Polri	212	235	368	122
7	Lainnya	1.215	980	2.344	680
Jumlah		25.553	22.550	35.057	12.592

Sumber : Bappeda Lampung Barat, 2015

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat sektor pekerjaan dan banyaknya jumlah tenaga kerja pada masing – masing sektor. Terlihat dari Tabel 10 bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Kawasan Agropolitan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat..

### **C. Letak Geografis Daerah Penelitian**

Untuk mendapatkan data usaha tani komoditas sayuran unggulan di kawasan agropolitan dilaksanakan pada pusat kawasan agropolitan Way Tenong yaitu di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat tepatnya pada dua desa (pekon) sentra produksi sayuran dataran tinggi unggulan di kawasan ini yaitu desa Tambak Jaya dan Padang Tambak.

Kecamatan Way Tenong sebagai pusat kawasan agropolitan berjarak 60 km dari Liwa sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pagar Dewa
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Hitam
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sekincau

Sebagian besar lahan pada kecamatan Way Tenong ini digunakan untuk perkebunan lahan kering dengan komoditas utama kopi disusul dengan lahan budidaya sayuran dataran tinggi dimana luasannya tercakup dalam luasan lahan ladang/tegalan. Berdasarkan penggunaannya luasan lahan pada Kecamatan Way Tenong dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Luas Lahan Berdasarkan Penggunaannya Di Kecamatan Way Tenong, 2015**

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
1	Sawah Irigasi	823,0	6,0
2	Sawah Tidak Irigasi	125,0	1,0
3	Ladang/Tegal/Tebut/Kolam	486,0	3,7
4	Perkebunan	4.192,0	32,2
5	Hutan	1.085,0	8,3
6	Pemukiman	478,5	3,6
7	Industri	0,0	0,0
8	Hutan Negara	5.652,0	43,5
9	Lain-lain	167,0	1,3
	Jumlah	13.008,5	100,00

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, 2015

#### **D. Sarana Prasarana dan Kelembagaan Pendukung Kawasan Way Tenong**

Kawasan Way Tenong telah memiliki beberapa sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang tersebut meliputi : jalan, jembatan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, lembaga pemerintahan, lembaga jasa keuangan, sarana air bersih, listrik dan sarana telekomunikasi (Bappeda Lampung Barat, 2010).

Prasarana jalan pada kawasan agropolitan ini memiliki jaringan jalan utama yang menuju ke arah Pusat Ibu Kota Lampung Barat (Liwa) dan Kota Bumi (Kabupaten Lampung Utara) serta Provinsi Lampung (Bandar Lampung). Prasarana jalan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan sayuran dataran tinggi yang dipasarkan dalam bentuk segar dan membutuhkan waktu yang cepat dalam proses pengangkutannya menuju pasar.

Poros-poros jalan yang menghubungkan pusat kawasan agropolitan dengan desa - desa sentra produksi sayuran dataran tinggi beberapa dilalui jalan kabupaten yang masih membutuhkan peningkatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi infrastruktur jalan di desa pusat produksi pada kawasan agropolitan umumnya masih membutuhkan peningkatan dan pembangunan jalan usaha tani. Jalan usaha tani sebagian besar masih berupa tanah dan hanya mampu dilalui oleh kendaraan roda dua. Kondisi ini menyulitkan dalam proses pengangkutan hasil panen sayuran dataran tinggi menuju pusat kawasan agropolitan yang untuk selanjutnya akan diangkut menuju pasar – pasar dalam daerah dan pasar luar daerah.

Prasarana dan sarana penunjang dalam penyediaan saprodi yang dibutuhkan untuk usaha tani sayuran dataran tinggi di kawasan agropolitan Way Tenong sudah cukup memadai. Petani dapat memperoleh berbagai sarana produksi pertanian dengan mudah dan cepat pada berbagai kios saprodi yang tersebar di kawasan agropolitan. Demikian pula halnya dengan bengkel alat dan mesin pertanian sudah tersedia di pusat kawasan agropolitan ini sebanyak 2 (dua) unit yang terdapat di Pekon (Desa) Fajar Bulan dan Mutar Alam.

Prasarana pemasaran hasil pertanian di kawasan agropolitan Way Tenong masih berupa pasar-pasar tradisional yang tersebar hampir di seluruh pekon (desa) dalam kawasan agropolitan dengan sistem pasar yang melakukan transaksi satu minggu atau dua minggu sekali kecuali pada pasar tradisional yang relatif besar yaitu pasar Fajar Bulan, Simpang Gadis dan Way Tebu yang melakukan transaksi setiap hari. Sebagian besar hasil pertanian terutama



komoditas unggulan sayuran dataran tinggi banyak dipasarkan keluar kawasan agropolitan, sehingga tidak terlalu tergantung pada aktivitas pasar tradisional dalam kawasan agropolitan. hortikultura sayuran dataran tinggi antara lain adalah

Ketersediaan kelembagaan penyuluhan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), kelembagaan petani (kelompok tani dan gabungan kelompok tani) serta koperasi unit desa. Kelembagaan penunjang lain yaitu lembaga jasa keuangan selain koperasi/perbankan untuk menunjang permodalan dan perekonomian telah tersedia pada kawasan agropolitan ini. Adapun keragaan kelembagaan penunjang di kawasan agropolitan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel 10

**Tabel 10. Kelembagaan Penunjang Yang Berada Pada Kawasan Agropolitan Way Tenong**

No	Kelembagaan Penunjang	Jumlah
1	Pasar	8
2	Lembaga Penyuluhan Kecamatan (BP3K)	5
3	Perbankan	3
4	Koperasi	11
5	Bengkel Alsintan	4
6	Kios Saprodi	28
7	Kelembagaan Petani	
	a. Kelompok Tani	451
	b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	52
8	Pusat Pendidikan (SD, SMP, SMU)	27
9	Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	3
10	Sarana Air Bersih	8
11.	Listrik	1
12	Sarana Telekomunikasi	1

Sumber : Bappeda Lampung Barat, 2015

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dapat juga dikatakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Pancasila sila ke-5 telah mengamanatkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, pada UUD 1945 pada pasal 34 yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Pelihara oleh Negara” telah memberikan amanat kepada Negara agar masyarakat miskin menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial, PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak daerah-daerah yang telah tersentuh oleh program ini salah satunya adalah Kecamatan Way Telong Kabupaten Lampung Barat.

#### **A. Pemahaman Program**

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Camat Way Tenong mengatakan,

“Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH, bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan anak usia sekolah maupun kehadiran di fasilitas kesehatan untuk anak balita dan ibu hamil.” (Wawancara tanggal 11 juni 2018)

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan dan kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan,

kasus kurang gizi. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program bantuan tunai bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) yang sedang hamil, nifas atau memiliki anak balita. Tujuan dilakukannya program ini adalah untuk meningkatkan tingkat kunjungan peserta ke fasilitas kesehatan terutama masalah kesehatan Ibu dan Anak yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan peserta. Dengan tertibnya mereka datang ke Posyandu diharapkan status kesehatan keluarga tersebut meningkat sehingga meningkat pula kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya akan memutus rantai kemiskinan yang selama ini mereka alami.

Pemanfaatan dana PKH praktis jauh lebih baik dalam konteks kebutuhan pakaian dan alat-alat sekolah anak-anak peserta PKH. Hasil wawancara dengan peserta PKH yang bernama Asmini:

“Dengan adanya PKH sekarang ini. kami lebih nyaman memenuhi kebutuhan anak sekolah. Dari dana PKH yang kami terima dibelikan sepeda untuk anak laki-laki kami. Biasanya ia berjalan kaki, atau menumpang temannya naik sepeda. Ia dulu sering terlambat dan sering tidak masuk sekolah. Karena harus berjalan jauh, sesampai di sekolah pelajaran sudah dilaksanakan. Bila ia bergantung kepada temannya yang memiliki sepeda, sering ia tidak masuk sekolah karena temannya itu belum tentu menjemputnya. Sedangkan adiknya yang juga sekolah kami belikan baju baru dari dana PKH. Kalau tidak ada PKH belum tentu kami bisa membelikan baru seragam yang baru” (Wawancara tanggal 11 Juni 2018).

Tetapi tidak selalu dana PKH diperuntukkan buat aktivitas jangka pendek sebagaimana dirancang dalam panduan program. Seorang peserta PKH penerima bantuan bernama Sariayu:

“Justru memanfaatkan dana bantuan PKH untuk uang saku anaknya ketika sekolah. Alasannya, anaknya itu sering tidak masuk sekolah karena tidak ada uang saku, dan dana PKH itulah solusinya” (wawancara tanggal 13 Juni 2018).

Sedangkan seorang peserta PKH lainnya yang bernama Warsini mengatakan:

“Manfaat yang saya dapat sangatlah besar, anak saya jadi rajin datang ke sekolah karena dana yang telah diberikan tadi telah dipergunakan untuk semua peralatan dan perlengkapan sekolah anak, sehingga anaknya senang mempunyai seragam baru dan hal-hal lainnya membuat anak saya menjadi semangat, karena sebelumnya malas sekolah sebab malu dengan teman-temannya” (wawancara tanggal 13 Juni 2018).

Hasil wawancara dengan Ahmad Yani selaku Geuchik Way Tenong Juga mengomentari tentang hal ini:

“Saya melihat langsung tentang program yang sedang berjalan ini dan ada perubahan masyarakat walau tidak keseluruhan namun manfaat yang diterima masyarakat khususnya RTSM peserta PKH sangat nampak mereka sangat terbantu oleh dana PKH ini, karena kalau cuma bantuan yang diterima setiap bulannya seperti beras raskin tidak terlalu berperan bagi kesehatan dan pendidikan bagi RTSM” (wawancara tanggal 12 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program pemerintah yang satu ini berdampak positif dan sangatlah bermanfaat bagi RTSM peserta PKH khususnya anak sekolah dan ibu hamil serta balita, dimana dari yang malas sekolah menjadi rajin untuk ke sekolah, dari yang tidak bisa pergi sekolah karena terhambat dari transportasi yang jauh kini bisa sekolah setiap hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dampak Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan peningkatan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan, imunisasi lengkap pada balita, serta banyaknya ibu yang memeriksakan

kesehatan balita. Sementara di bidang pendidikan ada peningkatan partisipasi SD dan SMP, juga pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi. Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan dari 5 indikator mengenai efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Way Tenong kabupaten Lampung Barat, terdapat 4 indikator yang efektif sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman Program**

Dapat Diketahui bahwa hasilnya efektif, karena informan memahami apa itu Program Keluarga Harapan dan paham ketika dimintai keterangan terkait Program bantuan tersebut.

#### **2. Ketepatan waktu**

Dapat disimpulkan bahwa hasilnya efektif, karena setiap awal bulan penerimaan dana PKH tidak pernah terlambat selalu tepat waktu masuk ke rekening setiap penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Biaya sekolah dan biaya kesehatan selama ini dirasa cukup berat. Masyarakat merasa terbantu untuk menyekolahkan anak-anaknya dan merasa tenang jika menghadapi sakit atau jika ada keluarga yang sakit, karena memiliki KIS.



### 3. Tercapainya Tujuan

Dapat Disimpulkan bahwa hasilnya efektif, karna banyak masyarakat terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan tersebut dan sedikit mengurangi beban mereka dalam masala sekola anak-anak dan kesehatan balita, ibu hamil, nipas dan menyusui

### 4. Perubahan Nyata

Dapat Disimpulkan bahwa hasilnya efektif, karna yang tadinya anak malas skola karna tidak ada uang saku jadi rajin sekola dan yang jauh karna alasan transportasi sudah sekola setiap hari dengan smangat, begitu pula dengan ibu hamil dan balita lebih terjamin gizi dan kesehatan nya karna tidak perlu takut untuk memeriksa kesehatan karna keterbatasan biaya.

Dan terdapat satu indikator yang tidak efektif dalam memilih sasaran atau target yang akan di tentukan menjadi peserta atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan. sebagai berikut: .

### 5. Ketepatan Sasaran

Mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran, karena masih banyak warga layak menerima bantuan, tetapi permohonan bantuannya ditolak karena sudah tidak ada lagi kuota. Padahal, penerima bantuan PKH di Kecamatan Way Tenong, rata-rata adalah keluarga mampu dengan kondisi rumah beton (rumah permanen). Ini di sebabkan oleh pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang lama dan ada juga unsur kekerabatan.

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya agar dapat dikatakan efektif harus memenuhi semua syarat dari kelima indikator yang telah di tentukan untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu program tersebut. Dalam penelitian ini di nyatakan tidak efektif karena terdapat indikator yang tidak mencapai suatu tujuan dari kelima indikator yang telah di tetapkan sebagai pengukur seberapa berhasilnya suatu program tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut :

Disarankan kepada pemerintah (Kemensos) sebaiknya segera mengintegrasikan PKH ini ke BPJS agar masyarakat yang memegang kartu PKH yang juga tidak terkover dalam Jamkesmas/Jamkesda tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, karna sangat disayangkan penerima bantuan masih bnyak masyarakat yang mampu dalam pinansial atau orang yang suda berkecukupan menerima dana yang seharusnya untuk masyarakat yang kesulitan untuk bersekolah dan memeriksakan kesehatan bagi balita daan ibu hamil ( kurang mampu/miskin ). Dan pemerintah lebih memperhatikan lagi data sensus penduduk seharusnya sudah menggunakan data terbaru agar tidak lagi dapat kesalahan dalam menentukan penerima Program Keluarga Harapan. Dalam kepengurusan sebaiknya memilih orang-orang yang netral yang tidak ada unsur kekerabatan di suatu desa tersebut agar lebih adil bagi masyarakat yang memang seharusnya menerima bansos tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Arikunto, Suharsini. 2005. *Menejemen Penelitian*. PT.Rineka Cipta. Jakarta.
- Burgin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Grafindo Persada.Jakarta.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah MadaUniversity Press. Yogyakarta.
- Daulay, Murni. 2009. *Kemiskinan Pedesaan*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Salim, Emil. 1994. *Kebijakan Pemerataan Mengatasi Kemiskinan*. Jakarta Press
- Hasan, M.I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Kartasasmita, Ginanjar 1997. “*Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*”, *Perencanaan Pembangunan*, No. 07. Januari.
- Milles, Mattew. 1992. *Analisa Data Kualitatif.Buku Sumber Tentang Metode metode Baru*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nazir, Mohamad. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

- Purwanto, Erwan Agus dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Slamet, Margono. 1994. *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia: Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: P.T Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Sumodiningrat.Gunawan.2009. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wibawa, Samodra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grasindo Persada. Jakarta.
- Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2002. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Buku Kerja Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). 2008. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Depsos RI*
- Buku Pedoman Umum PKH. 2008. Direktorat Jenderal bantuan dan jaminan sosial Departemen Sosial RI*
- Arikunto (2005) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi 2010. Jakarta: Rineke Cipta
- David Cox dalam Suharto (2009), *Coping Strategies dan Keberfungsian Sosial: Mengembangkan Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. Makalah yang disampaikan pada Seminar “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial”*. Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 17 Desember 2002
- Gunawan,1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat 1968. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Statistika I (Statistik Deskriptif)*. Edisi Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisa Data Penelitian Dengan Statistik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibnu, 2009 (Ibnu Mukhlisin. 2009. *J Definisi atau Pengertian Efektivitas*, <http://noebangetz.blogspot.com/2009/07/defenisi-atau-pengertian-efektivias.html>. diakses pada 19 Februari 2018)
- Kartasasmita, Ginanjar, 1993, *Kebijaksanaan dan Strategi Pengentasan kemiskinan*, Malang, Unibraw Fakultas Ilmu Administrasi
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo)
- Kurniawan Agung (2005), *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta Pembaharuan
- Martoyo Susiolo, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP)
- Sumodiningrat. 1999. *dalam jurnal: Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat*. oleh Rauf A. Hatu.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat Yogyakarta*, Pustaka Pelajar
- Sudarwati dalam Kartasasmita 2006 *Pembangunan Untuk Rakyat*. PT Pustaka Cideido. Jakarta 1996.
- Suharto, Edi 2003, "*Paradigma Baru Studi Kemiskinan*" dalam Media Indonesia, 10 September 2003
- Suharto, Edi dkk. (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Keluarga Miskin di Indonesia*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan (LSP) STKS.
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung:

Suharto, Edi (1998), *Human Development Strategy: The Quest for Paradigmatic and Pragmatic Intervention for the Urban Informal Sector*, working paper no.98/2, Palmerston North: Massey University in Bandung, Indonesia, makalah yang disajikan pada New Zealand Asian Studies Society 14<sup>th</sup> International

——— (2002a), *Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector: A Study of Pedagang Kakilima* in Conference, Canterbury University, Christchurch 28 November-1 December 2001.

Suharto, Edi (2004), “*Social Welfare Problems and Social Work in Indonesia: Trends and Issues*” (*Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu*), makalah yang disampaikan pada *International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia*, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret 2002

Suharto, Edi dkk., (2004), *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung: STKSPress

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Adm inistratif*. Bandung: Alfabeta.

Siregar, Syofian. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.)

### **Jurnal dan Dokumen:**

Asmawati, Fikriyah. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Yogyakarta Studi di Kelurahan Hargobinangun Kecamatan Pakem, Sleman-Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga. 2014.

*Buku Saku Pendamping PKH* oleh Kementrian Sosial RI Tahun 2011. Chandra, Rama. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Dampaknya terhadap Peserta Program*. Universitas Indonesia. 2010.

*Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Lampung*. TNP2K. 2011.

*Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung*. BI Perwakilan Lampung. 2012.

Kurniawan. *Studi Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman. 2016.

*Lampung Dalam Angka 2012*. BPS Provinsi Lampung. 2012.

*Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi BPS*. Edisi 27, Agustus 2012.

*Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan*. Bappenas. 2009.

Mubarak, Zaki. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Universitas Diponegoro. 2010.

Nurmiza, dkk. *Implementasi Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Tahun 2013 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Pinang Barat*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2014

*Panduan Umum Program Keluarga Harapan* oleh Kementerian Sosial RI Tahun 2011, Tahun 2013, dan 2014

*Panduan Solusi Masalah Kepesertaan dan Pemutahiran Data Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)* oleh Kementerian Sosial R.I Tahun 2013

*Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan* oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2010.

*Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2011.

Putri, Depi. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Di Umbulharjo Kota Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga. 2014.

## **Website**

[www://https://economy.okezone.com./read/2015/2018/1234daftar-23-daerahtertinggal-diindonesia](http://www://https://economy.okezone.com./read/2015/2018/1234daftar-23-daerahtertinggal-diindonesia)).

*Online Okezone Finance (10/12-2015-2019:10.18)*.

(sumber: berita online radarlambar.com, diakses pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 10:07 WIB).

(Sumber: [www://https://economy.okezone.com./read/2015/2018/1234daftar-23-daerahtertinggal-diindonesia](http://www://https://economy.okezone.com./read/2015/2018/1234daftar-23-daerahtertinggal-diindonesia))(17/03-2018: 17.32).



*Referensi: <http://www.sudahtahu.com/2012/02/21/331/kriteria-emiskinan-di-indonesia-menurut-badan-pusat-statistik-bps/#ixzz22gkVZivw>(<http://fokedki.blogspot.com/2012/08/kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>)*